



**JALAN TERJAL BAKORKAMLA DALAM
MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN WILAYAH LAUT
INDONESIA TAHUN 1972-2014**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

Disusun oleh:

HANIFAH

NIM. 13030112130019

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Hanifah menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata (S1), Strata (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua Informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 12 Mei 2017

Penulis

Hanifah

NIM. 13030112130019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Pelaut ulung lahir dari samudera yang ganas, bahkan teratai pun tetap tumbuh indah di tengah air yang kotor. Maka, kamu adalah apa yang kamu pikirkan, dan hidupmu adalah pilihan yang telah kamu tentukan.

Hanifah

Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan *National Building* bagi negara Indonesia, maka negara harus dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang.

(Pidato Bung Karno dalam *National Maritime Convention* 1963)

Mencintai, menunggu, menerima, dan mengikhlasakan adalah bagian dari proses panjang menuju bahagianya jadi sarjana.


Hanifah (2012-2017)

Dipersembahkan kepada:

Keluarga tercinta, dan orang-orang
yang menyayangiku

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Indriyanto', with a long horizontal stroke extending to the right. A short vertical line is drawn to the left of the signature, pointing downwards.

Dr. Indriyanto, S.H., M.Hum
NIP. 196407111990011001

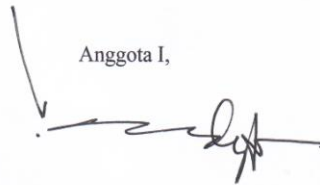
Skripsi dengan judul “Jalan Terjal Bakorkamla Dalam Mempertahankan Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia Tahun 1972-2014” yang disusun oleh Hanifah (13030112130019) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada 12 Mei 2017.

Ketua,



Dr. Endang Susilowati, M.A
NIP. 195905161988112001

Anggota I,



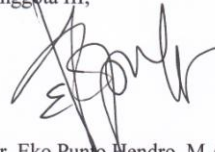
Dr. Indriyanto, S.H., M.Hum
NIP. 196407111990011001

Anggota II,



Dr. Agustinus Supriyono, M.A
NIP. 195508151987031001

Anggota III,



Dr. Eko Punto Hendro, M.A
NIP. 195612241986031003

Mengetahui,

Dekan



Dr. Rodyanto Noor, M.Hum
NIP. 195903071986031002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak karunia dan kemudahan, berkah, dan hidayah kepada penulis, sejak penulis lahir hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi S-1 Ilmu Sejarah ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada Baginda Mulia Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Jalan Terjal Bakorkamla Dalam Mempertahankan Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia Tahun 1972-2014” ini, penulis telah mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk bimbingan, saran, kritik, maupun fasilitas lainnya. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Danang Respati Puguh M.Hum selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Indriyanto, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis, serta tak lupa terima kasih kepada Drs. Mulyono, M.Hum selaku dosen wali penulis yang begitu sabar. Terima kasih penulis ucapkan juga kepada Bapak dan Ibu Dosen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi penulis, serta tidak lupa pula kepada Mba Fatma dan para staf tata usaha, dan Pak Romli selaku staf perpustakaan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya yang sangat membantu penulis selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Terima kasih dan apresiasi penulis berikan kepada seluruh keluarga Museum Bahari Jogja, Keluarga Besar Dinas Sejarah Angkatan Darat-Bandung, Bapak Ganjar yang sudi menerima dan menampung penulis selama melakukan penelitian di Bandung. Terima kasih kepada Mas Aditya Akbar T, SH, M.Si, dan Laksdya TNI (Purn) Yosaphat Didik Heru Purnomo yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi dengan penulis

selama penulis melakukan penelitian lapangan dan kritik sumber. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sungguh luar biasa, Bapak Sujana, S.Pd., M.Kom dan Ibu Evi Azriani yang dengan ikhlas mencurahkan segenap cinta, kasih, airmata, dan untaian-untaian doa yang tiada henti untuk penulis selama ini. Terima kasih untuk pengorbanan, keikhlasan, dan kesabaran-kesabaran atas kesalahan yang Ifah lakukan selama ini Pak, Bu. Terima kasih kepada abang tercinta Lutfi Adam, S.Pi., adik-adik tersayang Zakiatul Miski dan Ilham Fathullah yang telah memberikan dukungan moril, tempat curhat, teman berantem, serta dukungan semangat yang tiada henti.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Moh. Annas selaku dosen, senior, serta guru besar “kuliah subuh” yang sudi memberikan waktu istirahatnya untuk penulis dan kawan-kawan “kuliah subuh” berdiskusi, menuntut ilmu, dan berkelakar. Terima kasih yang tulus dari penulis teruntuk kawan-kawan hidupku, Kudus Purnomo dan “bude” Siti Fatimah, yang selalu setia menjadi tempat curhat, kawan untuk nangis, tertawa, menjadi “gelandangan” dalam mengais sumber-sumber, dan kawan untuk berdebat, makasih Dus, *de*, untuk kegilaan dan kisah hidup yang kita ukir, semua pengalaman-pengalaman indah selama lima tahun ini. Terima kasih pula kepada Yudi dan Yuk Peppy yang sudi menampung, direpotkan dan menjadi petunjuk jalan selama penulis melakukan penelitian di Jogja. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada rekan-rekan seperjuangan Tim Penggerak Pesantren Maritim (TPPM), Lisnur, April, Rufal, Dian Lehor, “bapak” Arif, Umar, Firman, Ichsan, Farid, Okik, dan Lingga, semangat membangun pesantren maritim, *gens*. Makasih buat Semarang-Kendal-Jakarta, dan jalan-jalan lainnya. Kawan-kawan *Maritime Study Group* (MSG), Mba Erna, Rafngi, Murni, Ayut, Suci, Zata, Iil, Wida, Muzamil, Ruslan, dan kawan-kawan lainnya. Makasih buat pengalaman hebatnya, *bro-sist*. Terima kasih juga untuk dukungan semangat yang tiada hentinya dari Muflika, Cipaw, Mba Nisa, Fani, dan Dewi Sartika. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Jurusan Sejarah angkatan 2012, senior, serta junior yang tidak bisa penulis

sebutkan satu persatu. Terakhir, terima kasih pula kepada keluarga Kos-18 yang penuh dengan kegilaan, akhirnya aku lulus juga walaupun paling *bontot* 😊

Akhir kata, penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan. Masukan, kritik, dan saran penulis harapkan untuk perbaikan mutu skripsi ini di kemudian hari. Penulisan skripsi ini hanya bersifat sementara. Apa yang telah ditulis di sini masih memiliki peluang untuk pengembangan dan koreksi di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, mereka yang membutuhkan informasi mengenai Sejarah Keamanan Maritim Indonesia, serta pembaca umumnya.

Semarang, 12 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
RINGKASAN	xviii
SUMMARY	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II KEAMANAN LAUT INDONESIA TAHUN 1958-1972	21
A. Keadaan Laut Indonesia	21
B. Sistem Keamanan Laut	31
C. Permasalahan Keamanan Laut Indonesia	39
BAB III PEMBENTUKAN BAKORKAMLA DI INDONESIA	49
A. Latar Belakang Berdirinya Bakorkamla	49
1. Landasan Hukum	51
2. Visi dan Misi	61
3. Tugas Pokok dan Fungsi	63
B. Keorganisasian	70
1. Komando Pelaksanaan Organisasi Keamanan Laut	72
2. Pembagian Area Tugas	77

BAB IV	TANTANGAN YANG DIHADAPI BAKORKAMLA DALAM MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN WILAYAH LAUT INDONESIA	84
	A. Tantangan dalam Melakukan Tugas	86
	1. Tantangan Dari Dalam	86
	2. Tantangan Dari Luar	93
	B. Keterbatasan	101
	1. Keterbatasan Anggaran	101
	2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana	104
	3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia	108
	C. Ego Sektoral dan Tumpang Tindih Kekuasaan	111
	D. Upaya yang Dilakukan	115
BAB V	SIMPULAN	125
	DAFTAR PUSTAKA	127
	DAFTAR INFORMAN	133
	LAMPIRAN	134

DAFTAR SINGKATAN

AD	: Angkatan Darat
Alkom	: Alat Komunikasi
ALRI	: Angkatan Laut Republik Indonesia
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
Asops	: Asisten Operasi
AU	: Angkatan Udara
Bakamla	: Badan Keamanan Laut
Bakorkamla	: Badan Koordinasi Keamanan Laut
BIN	: Badan Intelijen Negara
Deplu	: Departemen Luar Negeri
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DPLP	: Dinas Penjagaan Laut dan Pantai
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
ESDM	: Energi Sumber Daya Mineral
GBHN	: Garis Besar Haluan Negara
Guskamla	: Gugus Keamanan Laut
HACGAM	: <i>Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
Hankam/ABRI	: Pertahanan dan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Kalakhar	: Kepala Pelaksana Harian
Kamla	: Keamanan Laut
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

KKO	: Korps Komando
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLH	: Kementerian Lingkungan Hidup
KPLP	: Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
KRI	: Kapal Republik Indonesia
KSAL	: Kepala Staf Angkatan Laut
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Laksdya	: Laksamana Madya
Laksma	: Laksamana Pertama
Letjen	: Letnan Jenderal
Mabes TNI	: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
Makowilhan	: Markas Komando Wilayah Pertahanan
Menhankam/pangab	: Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata
Menhub	: Menteri Perhubungan
Menkeu	: Menteri Keuangan
Menkopolhukam	: Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan
MK	: Menteri Kehakiman
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pangkowilhan	: Panglima Komando Wilayah Pertahanan
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
Polair	: Polisi Air
Poleksosbudhan	: Politik Ekonomi Sosial Budaya dan Pertahanan
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
PPNS	: Pengawas Pegawai Negeri Sipil
PSDKP	: Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

RI	: Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
Satgas	: Satuan Tugas
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
SKB	: Surat Keputusan Bersama
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TIK	: Teknologi Informasi Komunikasi
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TNI AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TZMKO	: Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WNA	: Warga Negara Asing
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif
ZEEI	: Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

DAFTAR ISTILAH

<i>Asas Archipelago</i>	:	Azas kepulauan
<i>Boat People</i>	:	Manusia perahu
<i>Bottom Trawl</i>	:	Metode penangkapan ikan yang menggunakan jaring hingga ke dasar laut yang dapat merusak ekosistem
<i>Coast Guard</i>	:	Lembaga atau organisasi suatu negara yang bertanggungjawab terhadap semua kegiatan di laut
<i>Human Trafficking</i>	:	Tindakan yang melibatkan pemindahan, penyelundupan, atau menjual manusia baik di dalam maupun di luar negeri untuk tujuan perbudakan dan di dalam tekanan
<i>Illegal fishing</i>	:	Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak bertanggungjawab dan berlawanan dengan kode etik atau aturan di suatu tempat atau negara tersebut
<i>Illegal logging</i>	:	Kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu tanpa memiliki izin secara resmi
<i>Mindset</i>	:	Pola pikir
<i>Overfishing</i>	:	Penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebihan dan tidak memperhatikan ekosistem laut
<i>Piracy</i>	:	Tindak kejahatan di wilayah perairan
<i>Port Authority</i>	:	Penguasa pelabuhan
Pukat Harimau	:	Jaring penangkap ikan yang berbentuk kantong dan ditarik oleh satu atau dua kapal, namun dapat merusak segala yang dilewatinya
<i>Res Communis</i>	:	Laut dianggap sebagai milik bersama (zaman Romawi)
<i>Res Nullius</i>	:	Laut menjadi sesuatu yang diperebutkan untuk milik sendiri (dalam kekuasaan Portugis dan Spanyol)
<i>Staatsblad</i>	:	Lembaran negara yang berupa pengumuman, aturan-aturan, dan Undang-Undang
<i>Stakeholder</i>	:	Suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan

- Subversi** : Gerakan dalam usaha atau rencana menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan menggunakan cara di luar Undang-Undang
- Tonage* : Perhitungan ruang dalam kapal untuk muatan kargo yang dinyatakan dalam ton

DAFTAR TABEL

Tabel:		Halaman
3.1	Instansi Pemerintah yang Memiliki Satgas Di Laut	65
3.2	Pembagian Daerah Tugas Bakorkamla Berdasarkan ALKI	82
4.1	Jumlah Armada Kapal Ditjen P2SDKP s/d Tahun 2009	107
4.2	Jumlah Kapal Yang Berhasil Diperiksa pada Operasi Pengawasan Bersama Instansi Terkait Tahun 2005-2009	119

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:		Halaman
A	Garis Komando Bakorkamla di Lapangan	134
B	SK tentang Satgas Tim Korkamla	135
C	Rincian APBN Tahun 2005-2011	144

RINGKASAN

Skripsi ini berjudul “Jalan Terjal Bakorkamla Dalam Mempertahankan Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia Tahun 1972-2014”, dengan menggunakan metode sejarah kritis yang meliputi empat tahapan yakni: 1) heuristik, mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah baik sumber primer maupun sekunder; 2) kritik sumber, untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber; 3) interpretasi, menafsirkan dan menggabungkan antara fakta satu dengan lainnya; dan 4) historiografi, proses penulisan kembali peristiwa sejarah. Skripsi yang menggunakan pendekatan sosial-politik ini mengkaji tentang peranan dan kiprah Bakorkamla sebagai lembaga keamanan laut Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana kondisi keamanan laut Indonesia, proses pembentukan Bakorkamla, hingga tantangan yang dihadapi beserta upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut.

Bakorkamla adalah lembaga yang mengemban tugas untuk mengamankan seluruh wilayah laut Indonesia dari segala bentuk ancaman. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bakorkamla juga mengkoordinir dua belas *stakeholder* yang menjadi bagian dari anggotanya. Menjadi lembaga pengamanan laut, Bakorkamla menangani laut Indonesia yang begitu luas dengan permasalahan yang masih marak terjadi, seperti *illegal fishing*, imigran gelap, *over fishing*, penyelundupan, dan pelanggaran hukum lainnya. Selain menghadapi permasalahan di laut, Bakorkamla juga menghadapi permasalahan di dalam tubuhnya sendiri yakni berupa tumpang tindih kekuasaan, ego sektoral, perhatian dan fokus pemerintah yang masih kurang terhadap laut, dan aturan serta sistem koordinasi yang masih kurang jelas. Menghadapi berbagai bentuk permasalahan dan tantangan tersebut, Bakorkamla melakukan beragam upaya, di antaranya terus melakukan kerjasama-kerjasama baik dengan sesama instansi dalam negeri yang terkait dengan laut, maupun dengan negara lain. Upaya fisik yang dilakukan antara lain melakukan patroli-patroli yang semakin rutin dan ketat, dan terus melakukan upaya penambahan armada sebagai penunjang tugasnya. Bakorkamla juga melakukan pembagian daerah atau zona pengamanan dengan tujuan untuk pengefektifan dan pengoptimalan kerja di lapangan. Hal tersebut juga ditunjang dengan melakukan *roadmap* terkait alat-alat komunikasi dan sistem peringatan dini, yang tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. Bakorkamla juga selalu mengupayakan perbaikan sistem yang ada, seperti sesuai dengan tanggungjawabnya memberikan saran kepada presiden untuk mengambil kebijakan yang tertuang dalam bentuk aturan-aturan maupun undang-undang, yang tujuannya untuk mengurangi tumpang tindih kekuasaan dan ego sektoral yang selama ini terjadi.

SUMMARY

This thesis is entitled *Jalan Terjal Bakorkamla Dalam Mempertahankan Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia Tahun 1972-2014*, the research used critical historic method which consists of four steps, they are 1) heuristic, searching and collecting historical resources from primary and secondary sources, 2) source critics, in order to get authenticity and credibility sources, 3) interpretation, interpreting and combining one fact to another, and 4) historiography, rewriting historical events process. The thesis which uses socio-politics approach reviewed the *Bakorkamla* role and progress as Indonesian marine security agencies. The problems which are studied in this thesis are Indonesian sea condition, *Bakorkamla* shaping process, until challenge which is faced and the efforts done in handling the challenge.

Bakorkamla is an institution which in charge to secure the entire sea area of Indonesia from any kinds of threat. In application, *Bakorkamla* also coordinates twelve stakeholders that become its member. As a maritime security institution, *Bakorkamla* deals with Indonesian sea and its problems that are still occurred, such as illegal fishing, illegal immigrant, over fishing, smuggling and other law violations. *Bakorkamla* do not only deal with sea, but also deals with problems in its own institution in the form of overlapping powers, sector ego, lack of attention and focus of the government on the sea, and the unclear rules and coordination system. In facing those problems and challenges, *Bakorkamla* do many efforts like having cooperative relationship with the domestic and international institutions which relate with the sea. Physical effort is also done, such as having routine and rigorous patrol, and keeps adding the fleet to support its work. *Bakorkamla* also determines area or security zone with purpose to optimize and improve the effectiveness works in the field. It is supported by roadmapping related to communication tools and early warning system which are spread throughout Indonesian territorial sea. *Bakorkamla* keep trying to improve the existing system, such as corresponding with its responsibility in giving advice to president to take policy embodied in the form of rules or constitution, which purpose is reducing overlapping powers and sector ego which has been happening.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Negara Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang dua pertiga wilayahnya merupakan wilayah perairan atau lautan. Secara keseluruhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membutuhkan pengamanan yang optimal dalam upaya memelihara dan melindungi eksistensi NKRI sebagai negara kepulauan yang utuh. Untuk itu, wilayah laut yang merupakan integrasi wilayah Indonesia harus dipelihara dan dilindungi melalui pengamanan laut. Pengamanan laut tersebut bertujuan untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan dan hukum Indonesia di wilayah laut yang menjadi bagian bangsa ini. Indonesia yang dulunya lebih terkenal dengan sebutan Nusantara merupakan satu kesatuan dari seluruh wilayah darat, udara, laut termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, udara di atasnya, dan seluruh kekayaan yang harus dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.¹

Laut menjadi sangat penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Dengan mengoptimalkan potensi laut, Indonesia akan menjadi negara yang maju, karena mempunyai potensi yang sangat besar di bidang kelautan. Laut akan memberikan manfaat yang sangat vital dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia atau perdagangan pada khususnya. Mengingat kejayaan bangsa Indonesia pada masa lampau didapat dari hasil mengoptimalkan potensi laut sebagai sarana suksesnya bidang ekonomi dan politik, maka sudah seharusnya Indonesia lebih mengembangkan laut demi tercapainya tujuan nasional. Indonesia sebagai negara kepulauan dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan bangsa seharusnya berlandaskan pada kegiatan di laut. Pentingnya laut bagi Indonesia tentu disebabkan oleh keadaan geografisnya. Posisi Indonesia yang

¹Amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

strategis berada dalam jalur persilangan dunia, membuat Indonesia memiliki kesempatan yang sangat besar untuk mengembangkan potensi laut. Potensi yang dimiliki tersebut sudah barang tentu juga menjadikan Indonesia wilayah yang sangat rawan dengan pelanggaran hukum di dan lewat laut, baik berupa pencurian maupun penyelundupan.

Selain itu, kebijakan pemerintah juga memberikan sumbangan besar terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum di laut Indonesia. Sebagai contoh, pada masa pemerintahan Orde Baru (Orba) kebijakan yang diambil lebih berfokus pada pembangunan fisik dan lebih mengandalkan wilayah daratan sebagai sumber penghasilan negara, dibandingkan dengan pemanfaatan lautan. Pemerintah Orba mengakui akan potensi laut yang dimiliki Indonesia tetapi tetap memiliki fokus kebijakan pada daratan seperti yang tertulis dalam Repelita Kedua. Meskipun kegiatan-kegiatan di daratan untuk waktu yang masih lama akan tetap merupakan kegiatan-kegiatan utama, namun potensi-potensi laut mengandung tantangan dan kemungkinan yang besar bagi perkembangan ekonomi Indonesia di masa depan.²

Minimnya kebijakan pemerintah yang memberikan perhatian pada bidang maritim telah berlangsung sejak Indonesia merdeka. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda saat Indonesia menjadi negara koloni. Belanda mengubah pola pikir bangsa Indonesia dari bahari menuju agraris agar mereka dapat bertahan di Indonesia tanpa mengalami perlawanan yang berarti, karena mereka sadar kekuatan Indonesia berada di lautan.³ Di sisi lain terdapat ketimpangan pembangunan dalam bidang maritim, khususnya pembangunan kekuatan laut yang hanya berpusat di pulau Jawa. Hal ini terbukti dengan dibangunnya markas-markas Angkatan Laut (AL) yang sebagian besar di Pulau Jawa. Ketimpangan yang terjadi selama bertahun-tahun ini memicu berbagai permasalahan kelautan yang tak kunjung selesai.

²Departemen Penerangan RI, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua 1974/75-1978/79*. Hlm. 136.

³Abd Rahman Hamid, *Sejarah Maritim Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. x

Pelanggaran-pelanggaran hukum di laut tidak hanya dilakukan oleh warga masyarakat Indonesia sendiri, tetapi juga oleh Warga Negara Asing (WNA) terutama negara tetangga. Hal ini tentu tidak mudah ditangani mengingat perairan laut Indonesia yang begitu luas dengan petugas keamanan laut yang masih sedikit.

.....Kondisi ini diperparah dengan adanya petugas-petugas “nakal” yang demi tujuan tertentu mendukung dan terlibat dengan kasus penyelundupan itu sendiri. Hal ini ditegaskan oleh Panglima (Daerah Operasi Angkatan Laut) Daeral-1/Belawan Laksamana Pertama Mardianus Aroef dalam pidatonya pada kegiatan upacara di Mako Daeral tersebut. Menyinggung masalah penyelundupan, Mardianus menegaskan, para pelaku penyelundupan sesuai kehendak dari pemerintah, akan ditindak tegas. Karena itu diharapkan agar segenap anggota jajaran Daeral-1 maupun petugas-petugas Kamla tidak ikut serta dalam soal penyelundupan, baik langsung maupun tidak langsung. Termasuk mereka yang menjadi *backing* para penyelundup.⁴

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan alam khususnya laut di Indonesia masih banyak yang dikuasai oleh pihak asing, dan tidak sedikit yang sifatnya illegal dan untuk kepentingan pribadi. Pemerintah memiliki kewajiban dan harus berperan dalam menjaga dan mempertahankan serta mengelola kekayaan dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) laut Indonesia. Untuk mengelola SDA yang ada, dibutuhkan perbaikan infrastruktur, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), modernisasi teknologi, serta pendanaan yang berkelanjutan dan memadai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sehingga dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi negara dan warga masyarakat Indonesia.

Kegiatan dan permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum di laut Indonesia mempunyai lingkup yang luas, bersifat lintas sektoral, multi disiplin dan juga bersifat internasional. Oleh karena itu dalam penyelenggaraannya terlibat berbagai instansi pemerintah dan aparat penegak hukum terkait. Keterlibatan berbagai instansi dan aparat penegak hukum tersebut memerlukan kejelasan dan ketegasan tentang tugas dan peranan masing-masing instansi, agar tidak terjadi

⁴“Jangan ikut atau lindungi penyelundup”, *Angkatan Bersenjata*, 20 Maret 1976.

kerancuan yang dapat mengakibatkan tidak lancarnya upaya penegakan hukum di perairan Indonesia.

Lembaga atau instansi negara yang terlibat dalam penegakan hukum di perairan Indonesia tersebut tergabung dalam Bakorkamla. Bakorkamla adalah sebuah lembaga yang berwenang menegakkan hukum di laut yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Banyaknya instansi pemerintah yang terlibat bukan tidak mungkin menimbulkan perselisihan. Perselisihan-perselisihan yang terjadi dapat disebabkan oleh tumpang tindihnya kekuasaan di dalam Bakorkamla sendiri. Dengan adanya perselisihan di dalam tubuh Bakorkamla, maka pelaksanaan tugas di lapangan akan sulit terlaksana dengan baik dan lancar. Dengan kata lain akan ada hambatan atau jalan terjal. Salah satu contoh jalan terjal Bakorkamla adalah ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum dan birokrasi perijinan yang semrawut. Ketidakpastian hukum dicirikan oleh beberapa hal seperti pemahaman yang berbeda atas aturan yang ada, inkonsistensi dalam penerapan, diskriminasi dalam pelaksanaan hukuman bagi kapal-kapal asing yang melanggar, persekongkolan antara pengusaha lokal, pengusaha asing, dan pihak peradilan. Peradilan terhadap pelanggaran lambat, berlarut-larut dan korup.⁵

Semua hal tersebut di atas merupakan ancaman yang nyata bagi potensi laut Indonesia. Dengan demikian, sepanjang intensitas ancaman dianggap mengganggu ketertiban dan kepentingan hukum, maka tindakan yang diambil dalam menghadapi ancaman tersebut berupa penegakan hukum. Pengertian umum penegakan hukum adalah suatu kegiatan negara/aparatnya berdasarkan kedaulatan negara dan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional agar peraturan hukum yang berlaku di laut, baik aturan hukum nasional maupun aturan hukum internasional dapat diindahkan atau ditaati oleh setiap orang dan atau badan hukum dan negara sebagai subyek hukum. Dengan demikian dapat tercipta tertib hukum nasional dan tertib hukum internasional.

⁵Leonard Marpaung, "target baru illegal fishing", *Forum Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2009, hlm. 17 (<http://repository.usu.ac.id>, diunduh pada 29 Februari 2016).

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dalam penelitian skripsi ini diajukan permasalahan yaitu mengapa Bakorkamla menghadapi kesulitan dalam mempertahankan kedaulatan wilayah laut Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi keamanan laut Indonesia sebelum adanya Bakorkamla?
2. Mengapa dan bagaimana Bakorkamla dibentuk?
3. Tantangan apa yang dihadapi Bakorkamla dalam mempertahankan kedaulatan wilayah laut Indonesia?
4. Upaya apa yang dilakukan Bakorkamla dalam mempertahankan kedaulatan wilayah laut Indonesia?

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat terlaksana dengan mudah, lebih relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan.⁶ Selain itu, dengan adanya pembatasan ruang lingkup juga dapat membantu untuk mempertajam analisis.⁷ Penulisan skripsi ini menggunakan batasan-batasan yang mencakup ruang lingkup temporal, lingkup spasial, dan lingkup keilmuan.

Ruang lingkup temporal merupakan pembatasan kurun waktu terjadinya peristiwa yang akan diteliti. Penulisan skripsi ini memiliki batasan waktu 1972-2014. Tahun 1972 diambil menjadi batasan awal penulisan skripsi ini karena pada tahun 1972 Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) baru dibentuk oleh pemerintah. Pada awal pembentukannya, badan ini berkoordinasi dengan TNI AL terkait masalah pengamanan dan penertiban pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah laut Indonesia.

⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 1990), hlm. 19.

⁷Taufik Abdullah, "*Pendahuluan: Sejarah dan Historiografi*", dalam Taufik Abdullah dan Abdurrahman Suryomiharjo, ed., *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif* (Jakarta: Gramedia), hlm. xii.

Tahun 2014 menjadi batas akhir penelitian karena pada tahun ini Bakorkamla mengalami banyak perubahan besar, seperti terjadinya perubahan nama dan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Perubahan nama Bakorkamla menjadi Bakamla tentu diikuti dengan berbagai perubahan kebijakan. Salah satunya adalah cakupan wewenang yang dimiliki oleh Bakamla menjadi lebih luas. Perubahan nama ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disingkat Bakamla.

Lingkup spasial merupakan batasan tempat terjadinya peristiwa sejarah. Dalam penulisan skripsi ini ruang lingkup spasialnya mencakup seluruh wilayah laut Indonesia. Hal ini karena pelanggaran-pelanggaran hukum di laut Indonesia sangat marak terjadi, tidak hanya di laut Jawa tetapi juga di laut lainnya. Hal ini dikarenakan pengamanan yang masih sangat minim, terutama di wilayah-wilayah perbatasan.

Adapun batasan keilmuan, merupakan batasan sudut pandang atau disiplin ilmu yang diterapkan dalam penulisan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini lingkup keilmuan yang digunakan yaitu ilmu sejarah dengan fokus bidang maritim dan menggunakan pendekatan sosial politik. Dalam hal ini ilmu sejarah menyangkut aspek-aspek sosial yang menimbulkan perubahan di bidang lainnya.⁸

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan batasan ruang lingkup di atas, untuk memperjelas fokus analisis, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. *Pertama*, mengetahui bagaimana keadaan wilayah laut atau perairan Indonesia sebelum adanya Bakorkamla. *Kedua*, menganalisis alasan mengapa dan bagaimana dibentuknya Bakorkamla, hukum yang mendasarinya, serta pembagian tugas di dalam tubuh Bakorkamla. *Ketiga*, mengetahui kiprah Bakorkamla,

⁸Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia 1992), hlm 54-55.

tantangan dan kendala yang dihadapi dalam mempertahankan kedaulatan wilayah laut Indonesia. *Keempat*, mengetahui upaya yang dilakukan Bakorkamla dalam mempertahankan kedaulatan wilayah laut Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang penulis lakukan bertujuan agar penulisan yang dilakukan tidak sama dengan tulisan-tulisan yang sudah ada sebelumnya. Untuk itu, penulis melakukan tinjauan terhadap buku-buku sebagai berikut. *Pertama*, buku karya Susanto dan Dicky R. Munaf yang berjudul *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Dini*.⁹ Dalam buku ini dijelaskan bagaimana sistem pengendalian dan pengamanan yang dilakukan oleh Badan Keamanan laut (Bakamla).¹⁰ Buku ini menjelaskan pula bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bakamla dalam melakukan operasi dan tugasnya, juga menyebutkan pelanggaran-pelanggaran secara garis besar yang pernah terjadi di perairan laut Indonesia.

Relevansi buku ini dengan penelitian yang penulis lakukan sangatlah erat. Dalam buku ini dijelaskan juga tentang alat-alat atau sarana prasarana yang telah dimiliki oleh Bakamla. Dalam buku ini terdapat penjelasan tentang proses penegakan hukum di laut Indonesia, serta penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini keamanan dan keselamatan laut. Sistem peringatan dini ini digunakan untuk memantau perairan Indonesia secara berkelanjutan tanpa henti agar dapat mengetahui sejak awal setiap kecelakaan atau kegiatan ilegal di laut. Sistem ini telah dibangun oleh Bakorkamla sejak tahun 2007. Dijelaskan pula bahwa sistem ini mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi, antara lain peralatan radar,

⁹Susanto dan Dicky R. Munaf, *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Dini* (PT Gramedia Pustaka Utama: 2015).

¹⁰Pada masa Orba badan ini masih bernama Bakorkamla. Mulai berganti nama pada tahun 2014 era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

*Automatic Identification System (AIS), long range camera, dan ground station.*¹¹ Semua ada yang berada di *fixed station* yang tersebar dari Sabang sampai Merauke maupun yang ditempatkan di kapal-kapal.

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, buku ini membahas tentang Bakamla sementara skripsi ini membahas tentang Bakorkamla. Bakamla merupakan nama baru dari Bakorkamla setelah mengalami perubahan di berbagai hal termasuk Undang-Undang yang mengaturnya. Masa kinerja Bakamla tidak lagi menjadi bahasan penulis karena penulis menggunakan lingkup temporalnya hingga masa transisi dari Bakorkamla menjadi Bakamla.

Kedua, buku terbitan Bakamla yakni *Kewenangan dan Identitas Lembaga Penjaga Laut dan Pantai sebagai Penegak Hukum Keselamatan* karya Willem Nikson.¹² Dalam buku ini dijelaskan tentang keselamatan dan keamanan laut di Indonesia, meliputi peraturan dan perundangan keselamatan dan keamanan di laut atau pelayaran dan maritim, gambaran umum keselamatan dan keamanan di laut atau pelayaran dan maritim, pendekatan keselamatan dan keamanan di laut atau pelayaran dan maritim, pelaksanaan keamanan lingkungan maritim, landasan filosofis penyelenggaraan lembaga penjagaan laut dan pantai (*Sea And Coast Guard*), sejarah pembentukan lembaga penjagaan laut dan pantai (*Sea And Coast Guard*), dasar hukum lembaga penjaga laut dan pantai (*Sea And Coast Guard*) di Indonesia, serta upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan kasus-kasus terkait dengan keselamatan dan keamanan transportasi laut.

Sementara yang membedakan hasil penelitian ini dengan buku tersebut adalah cakupan isi pembahasannya. Dalam buku tersebut hanya membahas secara umum bagaimana seharusnya keselamatan dan keamanan di laut atau pelayaran maritim, serta membahas tentang lembaga penjagaan laut dan pantai (*Sea And Coast Guard*). Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kinerja Bakorkamla

¹¹Susanto dan Dicky R. Munaf, *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Dini* (PT Gramedia Pustaka Utama: 2015).

¹²Willem Nikson, *Kewenangan dan Identitas Lembaga Penjaga Laut dan Pantai sebagai Penegak Hukum Keselamatan* (Jakarta: Bakorkamla, 2009).

dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah laut, yang salah satu bagiannya membahas tentang keselamatan dan keamanan di laut tersebut. Dengan demikian maka sangat tampak perbedaan di antara buku *Kewenangan dan Identitas Lembaga Penjaga Laut dan Pantai sebagai Penegak Hukum Keselamatan* dengan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini.

Ketiga, hasil penelitian berupa tesis Richarunia Wenny Ikhtiari yang berjudul *Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menanggulangi Ancaman Non-Traditional Security, Studi Kasus: Illegal Fishing Periode 2005-2010*.¹³ Tesis ini menganalisa mengenai kebijakan laut Indonesia apakah sudah terwujud sebagai kebijakan yang seharusnya ada untuk sebuah negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki luas perairan 2/3 dari luas daratan sekitar 5.8 juta km², dengan garis pantai sepanjang 81.000 km². Dalam tesis ini Wenny juga menjelaskan adanya keistimewaan posisi dan letak strategis Indonesia di tataran dunia, laut merupakan media yang paling banyak di gunakan dalam hal lintas ekonomi maupun kapal-kapal militer, serta rentan akan isu *Non-Traditional Security* lainnya. Akan tetapi Indonesia, belum mampu mengatur dan mengelola keistimewaan laut tersebut dalam menghadapi isu *maritime security*, dikarenakan *law enforcement* yang belum optimal dilaksanakan, sehingga dalam kelembagaan nasional terjadi *overlapping* dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok yang saling berbenturan (dijalankan secara sektoral), serta banyaknya kepentingan antar negara di wilayah Asia Tenggara dalam menghadapi isu kelautan.

Dengan adanya kelemahan tersebut, Indonesia belum menjadikan dirinya sebagai negara maritim yang seutuhnya dan tidak terealisasinya kebijakan laut Indonesia yang akan membawa perubahan pada pembangunan ekonomi dan pertahanan keamanan di laut. Maka, strategi keamanan maritim yang kuat tidak dapat terwujud secara kuat dan normatif. Dalam tulisannya Wenny lebih berfokus tentang ancaman keamanan non-tradisional di laut yakni *illegal fishing*, yang

¹³Richarunia Wenny Ikhtiari, "Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman Non-Traditional Security, Studi Kasus: Illegal Fishing Periode Tahun 2005-2010" (Tesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011).

dalam penelitiannya mencakup lingkup temporal pada tahun 2005-2010. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, *illegal fishing* dan keamanan laut hanya menjadi salah satu isu yang menjadi bagian penulisan skripsi ini, bukan merupakan fokus utama dalam penelitian yang penulis lakukan.

Keempat, hasil penelitian Indra Jaya yang berjudul *Evaluasi Keamanan Laut Indonesia*.¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Indra ini sesuai dengan judulnya berfokus pada keamanan laut Indonesia untuk dievaluasi. Dalam laporan penelitian tersebut, yang dievaluasi adalah kondisi mengenai pengelolaan pengamanan wilayah laut di daerah, dan juga menganalisis hasil monitoring dan evaluasi mengenai pengamanan wilayah laut di daerah. Penelitian ini membahas tentang kemandirian laut Indonesia secara umum dan menyeluruh. Terdapat sedikit bahkan nyaris tidak ada pembahasan mengenai permasalahan yang dihadapi Indonesia di laut secara terperinci, melainkan lebih banyak membahas tentang sistem keamanan laut yang baik untuk Indonesia. Fokus penelitian inilah yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh Indra Jaya dengan penelitian yang penulis lakukan. Penulis lebih berfokus dalam hal permasalahan laut yang terjadi di Indonesia serta bagaimana kinerja Bakorkamla sebagai badan yang mengkoordinasi berbagai instansi untuk menaggulangnya.

Kelima, buku yang berjudul *Isu-Isu Kelautan dari Kemiskinan hingga Bajak Laut* karya M. Arif Nasution, dkk.¹⁵ Buku ini berupa kumpulan tulisan dari beberapa orang yang berisi tentang penggambaran bagaimana kondisi sebenarnya kehidupan maritim (kelautan) dari berbagai aspek dan dinilai dengan berbagai teori. Bahasan utama dalam buku ini mengulas tentang isu kelautan seperti kemiskinan, isu pemberdayaan nelayan, hingga mengangkat isu bajak laut. Dalam buku ini dibahas secara umum faktor-faktor kemiskinan yang terjadi pada masyarakat pesisir hingga terjadinya kegiatan pembajakan di laut. Berbeda

¹⁴Indra Jaya, "Evaluasi Keamanan Laut Indonesia" (Laporan penelitian studi kelayakan dalam melahirkan sebuah lembaga terkait dengan keamanan laut, 2004).

¹⁵Editor M. Arif Nasution, Badaruddin, dan Subhilhar, *Isu-Isu Kelautan Dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

dengan penulisan skripsi ini, buku ini hanya membahas isu-isu tersebut secara umum. Sementara skripsi ini membahas tentang beberapa isu-isu yang ada di dalam buku tersebut sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh Bakorkamla.

Keenam, buku karya Didik Heru Purnomo yang berjudul *Tahun 1511 Lima Ratus Tahun Kemudian*.¹⁶ Dalam buku ini berisikan tentang keadaan laut Indonesia sejak gagalnya melawan Portugis pada tahun 1511. Buku yang ditulis oleh beberapa orang ini juga menceritakan tentang bagaimana sikap Indonesia memandang lautnya selama kurun waktu tersebut. Buku ini dimulai dengan menyoroti Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dimana jarak diagonal antara Sabang ke Merauke adalah sama dengan jarak London ke Istanbul. Sebelum tahun 1511, Indonesia yang dulu dinamakan Nusantara sangat dikenal dengan kekuatan lautnya dan sangat disegani oleh negara tetangga bahkan China. Pada saat itu, perairan selat Malaka dan laut wilayah Timur Asia dikuasai oleh Nusantara. Kehebatan pelaut Indonesia sudah ada sejak abad kedua, ketika pelaut Indonesia mengarungi laut lepas hingga Madagaskar, Afrika.

Sejak jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada 1511, praktis kekuasaan Nusantara atas lautnya hilang. Kejatuhan Malaka diawali dengan ditemukannya jalur rempah-rempah oleh Ludovico Di Varthema, petualang dari Bologna-Italia yang menjejakkan kaki pertama kali di Ternate pada 1506 saat Sultan Bayanullah memerintah (1500-1521). Kekuasaan Nusantara atas lautnya semakin tak mungkin direbut kembali setelah Dipati Unus dari Demak tewas dalam penyerangan ke Malaka pada 1521.¹⁷

Dalam beberapa tulisannya, buku ini membahas tentang beberapa daerah di Timur Indonesia membutuhkan kehadiran lembaga atau instansi pengamanan laut yang baik. Disebutkan pula bagaimana kondisi laut di sana yang masih rawan dengan tindak pelanggaran hukum. Kehadiran buku ini sangat bermanfaat bagi penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini, karena dengan buku ini penulis

¹⁶Didik Heru Purnomo, *Tahun 1511 Lima Ratus Tahun Kemudian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

¹⁷Didik Heru Purnomo, *Tahun 1511 Lima Ratus Tahun Kemudian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

dapat mengetahui bagaimana kondisi wilayah perairan Indonesia bagian timur dengan cukup jelas. Meski demikian, buku ini tetap memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan antara buku ini dan skripsi yang penulis tulis adalah tentang lingkup temporalnya. Buku ini memiliki bahasan dari tahun 1511 hingga tahun 2011, sementara penelitian yang penulis lakukan bermula dari tahun 1972 hingga tahun 2014. Selain itu, lingkup temporal yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah pada wilayah secara nasional, tidak hanya pada satu wilayah seperti wilayah bagian timur. Jadi, meski memiliki beberapa persamaan namun tetap memiliki perbedaan yang cukup jelas.

E. Kerangka Pemikiran

Sejarah sebagai kisah yang mengkaji tentang kehidupan masyarakat tentu tidak dapat berdiri sendiri. Sebagai ilmu yang mengkaji masyarakat, sejarah memerlukan disiplin ilmu lain dalam proses pendekatan terhadap objek penelitiannya. Menggunakan dan memahami disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan objek penelitian sangatlah penting bagi seorang peneliti, sebab akan berguna untuk membantu menyeleksi sumber-sumber sejarah, menjelaskan hubungan kausalitas atau sebab-akibat, menjelaskan kondisi, serta hubungan keterkaitan dan urutan fakta-fakta yang ditemukan atau dengan kata lain merekonstruksi suatu peristiwa sejarah. Langkah terpenting dalam rekonstruksi sejarah adalah penyusunan kerangka pemikiran yang mencakup berbagai konsep dan teori.¹⁸ Selain itu proses rekonstruksi suatu kejadian atau peristiwa akan bergantung pada pendekatan yang digunakan, dari mana sudut pandang yang digunakan, berbagai dimensi mana yang diperhatikan, dan unsur-unsur apa saja yang harus dikupas.¹⁹

Skripsi ini mengkaji tentang “Jalan Terjal Bakorkamla Dalam Mempertahankan Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia Tahun 1972-2014”. Untuk

¹⁸Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 2.

¹⁹Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, hlm. 4.

membangun kerangka pemikiran dalam penelitian ini maka pertama-tama akan diuraikan pengertian dari kata jalan terjal. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata terjal memiliki arti curam. Jalan terjal dalam penulisan skripsi ini maksudnya adalah jalan yang curam, yang penuh tantangan dan rintangan, jalan yang penuh perjuangan yang harus dilalui Bakorkamla dalam menjaga kedaulatan wilayah laut NKRI.

Selanjutnya adalah nama Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Kata koordinasi pada nama tersebut mengandung arti proses atau upaya sinkronisasi dan pembentukan hubungan fungsional antara unsur-unsur dari suatu sistem atau subsistem untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti sudah dijelaskan dalam latar belakang, Bakorkamla adalah suatu lembaga/badan/instansi yang memiliki tugas utama mengkoordinasikan *stakeholder-stakeholder* terkait dengan laut. Konsep berikutnya adalah kedaulatan. Secara harfiah, pengertian kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri.²⁰ Kedaulatan dalam kajian ini dimaksudkan sebagai hak yang dimiliki pemerintah untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan Indonesia. Kedaulatan dalam kajian ini berfokus pada kedaulatan yang dimiliki negara untuk wilayah perairan dan laut Indonesia. Bagaimana pemerintah menggunakan haknya untuk mengambil kebijakan guna mengatur kelautan di negara ini.

Herbert Simon membagi prinsip administrasi menjadi empat bagian, yaitu:

1. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi tugas di kalangan kelompok.
2. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu hirarki yang pasti.
3. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil.

²⁰Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 174.

4. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan, untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, langganan, tempat.

Dari pembagian administrasi di atas, dapat dilihat bahwa administrasi di dalam tubuh Bakorkamla masih kurang efisien dan efektif. Oleh karena itu masih terus terjadi sistem koordinasi yang kurang baik, sehingga berakibat kepada tumpang tindih dan ego sektoral saat melakukan tugas atau kegiatan di lapangan. Selain itu penulis perlu pula meminjam konsep-konsep dari disiplin ilmu lain guna mempertajam analisis. Pendekatan yang sesuai dengan kajian penelitian yang dilakukan adalah pendekatan politik. Penggunaan pendekatan tersebut dimaksudkan agar dapat diperoleh suatu fakta sejarah yang sesuai dan berkaitan dengan tema yang penulis ambil. Pendekatan politik digunakan karena persoalan dalam tema yang penulis kaji berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa itu. Selain mengkaji kebijakan yang diambil pemerintah, penulis juga memerlukan disiplin ilmu politik untuk mengkaji alasan dibalik pelanggaran-pelanggaran hukum di laut ini. Kaitan atau hubungan antara pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dengan kebijakan yang diputuskan pemerintah akan sangat relevan jika dikaji dengan sudut pandang politik.

Menurut Jack C. Plano, politik adalah persaingan di antara para individu dan kelompok atas alokasi nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, mencakup proses pengendalian sosial, lingkungan dan pencapaian tujuan bersama. Berbagai corak politik dengan mudah dapat dilihat pada kelompok sosial seperti pengambilan keputusan, pencarian kekuasaan, mengalokasikan nilai, dan cakupan tujuan.²¹ Dalam hal ini akan disoroti bagaimana pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik di negara ini mengambil keputusan dan kebijakan terkait wilayah laut Indonesia. Keamanan terutama di wilayah laut sangat penting karena melalui laut segala kemungkinan bisa saja terjadi.

²¹Jack C. Plano, *Kamus Analisa Politik* (Jakarta: P.T Rajawali, 1989), hlm. 163-164.

Jalan terjal yang dialami oleh Bakorkamla dilihat dari berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di perairan laut Indonesia, seperti penyelundupan-penyelundupan, *illegal logging*, *illegal fishing*, dan berbagai pelanggaran lainnya. Dalam *Report on Oceans and the Law of the Sea* pada tahun 2008 disebutkan beberapa indikasi yang dapat dinyatakan sebagai suatu ancaman terhadap *Maritime Security*, antara lain:²²

1. *Piracy dan Armed Robbery*, kejahatan laut yang membahayakan keselamatan para pelaut serta keamanan jalur navigasi dan komersil.
2. *Terrorist acts*, yang mengancam kapal, *offshore installations* dan kegiatan maritim lainnya yang berdampak pada terganggunya keadaan ekonomi negara bahkan sampai pada penyerangan fisik.
3. *Illicit trafficking in arms and weapons of mass destruction*.
4. *Illicit trafficking in narcotic drugs and psycotropic substance*, yang menyumbang sebesar 70 persen dari total perdagangan obat-obatan baik selama maupun setelah pelayaran.
5. *Smuggling dan trafficking of persons* melalui laut dengan menggunakan kapal yang tidak layak guna dan perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.
6. *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, diidentifikasi pada skala *food security* yang mengancam terhadap kestabilan hubungan internasional dan keamanan laut.
7. Kesengajaan maupun pelanggaran hukum terhadap lingkungan maritim sebagai suatu isu penting bagi potensi sumber daya laut yang mengancam keamanan suatu negara maupun negara banyak yang mempengaruhi hubungan kepentingan sosial, dan ekonomi negara pantai.

Dari beberapa jenis ancaman di ataslah penulis memiliki acuan untuk merekonstruksi ancaman dan permasalahan di bidang keamanan laut Indonesia dalam tulisan ini.

²²Natalie Klein, Joanna Mossop, dan Donald R. Rothwell, *Maritime Security : International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand*, (New York : Routledge, 2010) hlm. 7-8.

F. Metode Penelitian

Penelitian sejarah seperti halnya penelitian dalam disiplin yang lain, didasarkan pada ketertarikan, keingintahuan, kemampuan untuk mencatat informasi dengan cepat, dan kegigihan dalam menapaki jalan yang sulit.²³ Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah. Metode sejarah terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.²⁴

a. Heuristik

Heuristik adalah tahap pengumpulan data berupa sumber-sumber tertulis dan lisan dari peristiwa masa lampau baik sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer adalah informasi yang didapat dari seorang yang menyaksikan secara langsung jalannya peristiwa, ataupun orang yang hidup sezaman dengan peristiwa yang diteliti, atau dari alat perekam yang hadir saat peristiwa berlangsung. Adapun sumber sekunder adalah sumber yang memberikan atau menyajikan informasi bukan dari orang pertama yang menyaksikan peristiwa tersebut.

Dalam penelitian sejarah, sumber sekunder berguna sebagai sarana untuk memahami latar belakang subjek sesuai dengan bukti-bukti sezaman, mendapatkan kutipan dari sumber-sumber sezaman yang dapat melengkapi sumber primer ketika sumber primer sulit untuk didapatkan. Sumber sekunder juga dapat memberikan petunjuk untuk penelusuran bibliografi, dan juga dapat membantu peneliti dalam melakukan interpretasi terkait masalah atau tema yang diteliti.

Sumber-sumber yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber tertulis dan tidak tertulis. Sumber-sumber tertulis berupa artikel-artikel surat kabar, klip koran yang didapat dari Dinas Sejarah Angkatan Darat, Bandung. Penulis mendapatkan pula sumber tertulis dari Depo Arsip Koran Suara Merdeka, Kantor

²³Pamela Brooks, *How to Research Local History*, (Oxford: How to Books, 2008), hlm. 2.

²⁴Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, di Indonesiakan oleh Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1945), hlm. 15.

Pusat Badan Keamanan Laut, Badan Arsip Jawa Tengah, Museum Bahari Jogja, dan Museum Satria Mandala. Beberapa sumber juga diperoleh melalui media online atau internet. Selain itu penulis juga menggunakan sumber tidak tertulis yakni sejarah lisan yang berupa wawancara.

Sumber-sumber tersebut memuat fakta-fakta terkait dengan keadaan laut Indonesia antara lain keadaan laut, pengamanan yang dilakukan, peristiwa penangkapan kapal-kapal pencuri ikan, peristiwa-peristiwa penyelundupan, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan Keamanan Laut (Kamla) terkait penerapan hukum laut, dan perkembangan keadaan keamanan laut Indonesia.

b. Kritik

Kritik adalah tahapan melakukan pengujian kelayakan seperti keaslian sumber dan kredibilitas fakta yang terdapat di dalam sumber. Kritik sumber ini dilakukan untuk memisahkan sumber-sumber yang relevan dengan tema atau topik yang diteliti atau tidak, baik melalui kritik ekstern maupun kritik intern.

Kritik ekstern bertujuan untuk memastikan keaslian sumber. Keaslian sumber yang dimaksud adalah sumber yang belum diteliti atau diterjemahkan, masih dalam bentuk awal layaknya ia ditulis atau dikeluarkan dari tangan penulis atau pengarangnya, atau dari orang/tangan pertama dan bukan dari sumber atau orang lain. Adapun kritik intern penting dilakukan karena bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta yang dapat dipercaya dari sumber-sumber yang digunakan.

c. Interpretasi

Interpretasi adalah tahapan penafsiran fakta yang telah dikumpulkan dengan membuat hubungan antar fakta dengan menggunakan bantuan imajinasi dan teori, sehingga mendapatkan pemahaman terhadap fakta sejarah. Fakta-fakta sejarah

yang telah diseleksi kemudian disusun, diberi atau dikurangi tekanan dan kemudian ditempatkan di dalam urutan-urutan kausal.²⁵

d. Historiografi

Historiografi adalah tahapan terakhir metode sejarah kritis dalam melakukan rekonstruksi peristiwa sejarah masa lalu yakni melakukan penulisan kembali peristiwa sejarah masa lalu setelah melalui tahapan-tahapan sebelumnya. Hasil dari rekonstruksi peristiwa sejarah tersebut disebut sebagai sebuah karya historiografi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan dalam proses penulisan skripsi. Skripsi ini terdiri dari lima bab dan ditambah daftar pustaka serta lampiran. Bab I berisikan pendahuluan, diantaranya terdapat latar belakang penulis mengambil tema “Jalan Terjal Bakorkamla Dalam Mempertahankan Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia Tahun 1972-2014”, dan permasalahan-permasalahan yang dikaji. Ruang lingkup atau batasan yang diambil dalam proses penulisan seperti lingkup temporal, lingkup spasial, dan lingkup keilmuan. Pada poin selanjutnya ada tujuan penelitian. Bagian ini akan memberikan penjelasan secara singkat dilakukannya penelitian dengan tema yang telah diambil. Terdapat pula tinjauan pustaka yang didalamnya menjelaskan buku-buku yang relevan untuk dikaji sesuai dengan tema penulisan skripsi ini. Pendekatan merupakan langkah selanjutnya dalam penulisan skripsi ini dimana dijelaskan metode atau disiplin ilmu lain yang digunakan dalam proses penelitian. Kerangka pemikiran adalah penjelasan terkait konsep-konsep dan pendekatan yang digunakan selama melakukan penelitian. Metode penelitian adalah metode atau cara dan langkah yang dilakukan selama penelitian, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Terakhir adalah sistematika penulisan yang memberikan gambaran singkat tentang bagian-bagian dan isi dari skripsi ini.

²⁵Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 169.

Bab II berjudul Keamanan Laut Indonesia. Pada bab ini akan dikaji tentang keadaan laut Indonesia sejak adanya pembahasan UNCLOS I pada tahun 1958 hingga keadaan laut sebelum didirikannya Bakorkamla. Selain itu bab ini juga membahas tentang bagaimana sistem keamanan laut, serta apa saja permasalahan keamanan laut yang ada di perairan Indonesia. Dalam bab ini akan dianalisis pula tentang kebijakan hukum dan aturan laut yang ada di dunia secara umum dan di Indonesia secara khusus.

Bab III berjudul Pembentukan Bakorkamla di Indonesia. Dalam bab ini akan dianalisis tentang segala hal yang berhubungan dengan Bakorkamla. Bab ini akan menjelaskan tentang alasan pembentukan Bakorkamla, proses pembentukannya, serta menjelaskan tentang aturan dan keputusan-keputusan yang mendukung dibentuknya Bakorkamla. Selain itu, bab ini juga akan membahas tentang personel yang dimiliki oleh Bakorkamla, tentang kekuatan yang dimiliki, serta model komando yang dijalankan, serta menganalisis tentang SDM yang dimiliki Indonesia.

Bab IV berjudul jalan terjal Bakorkamla dalam mempertahankan kedaulatan wilayah laut Indonesia. Analisis dalam bab ini akan membahas tentang segala bentuk kendala yang dihadapi oleh Bakorkamla dalam menjalankan tugasnya, yakni mempertahankan kedaulatan wilayah laut Indonesia. Selain itu, dalam analisis ini juga membahas tentang perjuangan Bakorkamla menjaga dan mengamankan sumber daya bawah laut, baik berupa hayati maupun non-hayati. Dalam bab ini pula akan dijelaskan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dan lewat laut Indonesia, serta jumlah anggaran yang diterima oleh Bakorkamla untuk menjalankan tugasnya, serta hubungan antara anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dari APBN untuk Bakorkamla dengan peningkatan sarana prasarana yang dimiliki. Selain itu pada bab ini juga akan menganalisis dampak yang timbul akibat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan kaitannya dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Analisis terakhir pada bab ini adalah upaya yang dilakukan Bakorkamla dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia.

Bab V berisikan kesimpulan atau jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan yang telah penulis rumuskan dalam Bab I. Dalam penulisan ini terdapat daftar pustaka yang menyebutkan buku-buku, situs-situs internet, rekaman yang menjadi sumber-sumber yang membantu penulis dalam menuliskan skripsi ini. Terakhir adalah lampiran yang mencantumkan sumber-sumber yang penulis gunakan sebagai bukti benar adanya keberadaan sumber tersebut.